

BAB IV

AKHIR KONFLIK OPERASI MILITER DI ACEH

A. Pencabutan Status Daerah Operasi Militer di Aceh.

Konflik dan kekerasan di Aceh yang semakin berlarut-larut membuktikan strategi yang digunakan pemerintah tidak berhasil. Strategi pemerintah dalam menangani konflik terlihat mengalami pergeseran ketika rezim Orde Baru dijatuhkan pada tahun 1998.¹ Krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia sejak tahun 1997 telah memicu demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya untuk menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan melimpahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Habibie.² Hal tersebut menandai era politik baru yang ditandai dengan semangat reformasi di Indonesia.

Setelah Soeharto turun pada Mei 1998, iklim reformasi melahirkan situasi yang memungkinkan terjadinya perubahan yang radikal. Presiden yang baru, Habibie, mengakhiri status Aceh sebagai wilayah pemerintahan militer pada tanggal 7 Agustus 1998 dan sejumlah pasukan dengan terang-terangan ditarik. Tetapi jauh lebih penting adalah langkah Habibie membebaskan pers, sehingga untuk pertama kali pers dapat melaporkan aksi-aksi militer pada masa sekarang dan pada masa lalu. Banyak

¹ Syamsul Hadi. *Disintegrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm. 56.

² Ikrar Nusa Bhakti. *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 16.

organisasi swadaya masyarakat dibentuk di Aceh untuk menuntut ganti rugi atas kejahatan yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil selama operasi-operasi militer atas gerakan kemerdekaan itu.³ Berita-berita mengenai kejahatan di Aceh semasa Daerah Operasi Militer di Aceh (DOM) terus mengalir dari pers yang semakin bebas.⁴

Selain itu, Jenderal Wiranto, yang kemudian menjabat Menhamkam dan Panglima ABRI, pada 7 Agustus 1998 mengakui adanya dampak negatif dari pelaksanaan DOM di Aceh. Wiranto juga memohon maaf dan berjanji akan menghapuskan status DOM yang telah ditetapkan sejak tahun 1989. Berikut pernyataan Wiranto:

“Pada hari ini, selaku pimpinan ABRI dan atas restu Presiden, saya putuskan bahwa keamanan Aceh sepenuhnya saya serahkan kepada rakyat Aceh sendiri. Yaitu kepada para ulama, tokoh masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk satuan ABRI milik Polda dan Korem Aceh sendiri. Kepada Pangdam I Mayjen TNI Ismet Yusaeri, saya beri waktu satu bulan untuk menarik semua pasukan yang bukan organik Aceh, kembali ke pangkalannya masing-masing.”⁵

Selaku pimpinan ABRI, Wiranto memutuskan bahwa keamanan Aceh sepenuhnya diserahkan kepada rakyat Aceh sendiri, yaitu kepada para ulama, para tokoh masyarakat, para guru, para pejabat pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk satuan-satuan ABRI milik Polda dan

³ Foto demo anti militer di Aceh dapat dilihat pada Lampiran 14, hlm. 111.

⁴ Reid, Anthony. *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2001, hlm. 349.

⁵ Mba, (dkk). “Dicabut status DOM Aceh”, *Kompas*, 8 Agustus 1998 dapat dilihat pada Lampiran 15, hlm. 112.

Korem-Korem Aceh sendiri. Kepada Pangdam I diberi waktu satu bulan untuk menarik semua pasukannya yang bukan organik Aceh, kembali ke pangkalannya masing-masing.

Wiranto juga memerintahkan penarikan seluruh pasukan dari Aceh pada akhir bulan Agustus.⁶ ABRI akan ditarik ke satuan masing-masing. Setelah pencabutan DOM secara resmi pasukan non organik di Aceh ditarik secara bertahap. Selain itu kendati pun kekacauan-kekacauan masih terjadi di Aceh baik terjadi secara insidental maupun karena rekayasa tetapi masyarakat di Aceh semakin berani secara terbuka berbicara mengenai penderitaan masyarakat di masa DOM. Masyarakat bahkan sudah berani memprotes pemerintah terutama sekali terhadap ABRI atas tingkah laku mereka ketika Aceh dijadikan DOM.⁷

Setelah pencabutan DOM pada tanggal 7 Agustus 1998, masyarakat Aceh dikejutkan dengan penemuan tim pencarian fakta yang dilakukan oleh Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh yang mengekspose kekejaman dan kebengisan ABRI selama DOM. Ditemukan sejumlah kasus pembunuhan massal, penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan-penyiksaan brutal dan sadis yang diluar batas perikemanusiaan yang dilakukan oleh anggota ABRI maupun GPK selama DOM.⁸ Lembaga

⁶ Ikrar Nusa Bhakti, *op.cit.*, hlm. 17.

⁷ Hasbi Amiruddin. *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*. Yogyakarta: Geninnets Press, 2004, hlm. 63.

⁸ Syamsuddin Haris, (dkk). *Indonesia di Ambang Perpecahan?*. Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 60.

non pemerintah tersebut kemudian membentuk Forum Peduli HAM Aceh, yang sejak bulan Juni lalu menerjunkan anggotanya, sebagai pencari fakta di lapangan tentang korban operasi militer antara tahun 1989-1998, di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur.

Forum Peduli HAM Aceh, melaporkan bahwa sejak diberlakukannya DOM pada tahun 1989 sampai 1998 ditemukan 1.000 orang mengalami pembantaian dan penganiayaan berat. Sementara itu laporan di DPRD Pidie berjumlah 375 kasus, yang mencakup orang hilang dan kekerasan lainnya, dibunuh, diperkosa, dan disiksa diluar perikemanusiaan. Selama DOM diberlakukan sedikitnya telah menelan 5.000 nyawa orang Aceh. DOM mengakibatkan pula peningkatan jumlah janda-janda dan anak yatim piatu yang terlantar, juga kuburan-kuburan massal.⁹

Para pencari fakta korban DOM semakin berani mencari data ke Aceh, apalagi ketika Komnas HAM turun ke lapangan untuk melihat langsung mengenai korban DOM. Berdasarkan fakta yang ditemukan, terungkap sejumlah tindakan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan yang dilakukan ABRI saat Aceh diberlakukan sebagai Daerah Operasi Militer pada tahun 1989 sampai 1998.

⁹ Al-Chaidar. *Aceh Bersimbah Darah: Pengungkapan Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 11.

Tabel 1.**Laporan Jumlah Kasus Selama Berlangsungnya DOM di Aceh**

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Tewas/Terbunuh	1.321 Kasus
2.	Hilang	1.958 Kasus
3.	Penyiksaan	3.430 Kasus
4.	Pemeriksaan	128 Kasus
5.	Pembakaran	597 Kasus

Sumber: Forum Peduli HAM Aceh 1999.¹⁰

Tabel 2.**Daftar Korban Selama DOM di Aceh**

No.	Jumlah Korban	Keterangan
1.	781 Orang	Meninggal
2.	163 Orang	Hilang
3.	368 Orang	Dianiaya
4.	3.000 Wanita	Menjanda
5.	15.000-20.000 Anak	Menjadi Yatim
6.	102 Wanita	Diperkosa
7.	102 Bangunan	Dibakar

Sumber: Tim Pencari Fakta Komnas HAM.¹¹

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah korban yang dilaporkan Forum Peduli HAM Aceh adalah 1.321 Kasus berbeda dengan jumlah yang dilaporkan Tim Pencari Fakta Komnas HAM yaitu berjumlah 781 kasus orang meninggal. Begitu juga dengan kasus yang dilaporkan lainnya, terdapat perbedaan jumlah. Hal ini disebabkan karena

¹⁰ Fikar Eda, (dkk). *Aceh Menggugat: Sepuluh Tahun Rakyat Aceh di Bawah Tekanan Militer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999, hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 15.

Forum Peduli HAM Aceh lebih mendalam dalam menggali informasi mengenai korban DOM, berbeda dengan hasil yang diperoleh Tim Pencari Fakta Komnas HAM yang menunjukkan hasil yang lebih sedikit karena kurang mengetahui kondisi geografis Aceh dan kondisi masyarakat Aceh. Namun disamping itu, terdapat jumlah kasus pelanggaran HAM yang memprihatinkan.

Setelah pencabutan status DOM, Sekjen Komnas HAM Baharuddin Lopa bersama tiga anggotanya pada akhir Agustus 1998 mengunjungi Aceh dan melakukan investigasi. Komnas HAM menemukan sejumlah kuburan massal di Aceh yang diyakini sebagai korban pembunuhan oleh militer saat DOM berlangsung. Korban meninggal pun diperkirakan lebih dari 1000 orang. Salah satu bukit tengkorak tempat kuburan massal para korban ABRI terdapat di Bukit Seuntang, Lhoksukon, Aceh Utara.¹²

Menurut mantan Danrem Liliwangsa Kolonel Dasiri Musnas, sampai status DOM dicabut tak kurang dari 60 anggota ABRI jadi korban GAM. Berdasarkan temuan pencari fakta korban DOM, Pangab harus meminta maaf pada seluruh rakyat Aceh atas tingkah laku prajurit ABRI jika telah melukai hati rakyat Aceh selama mereka melaksanakan operasi

¹² Mukhtaruddin Yakub. "Pergolakan Aceh", *Tajuk*, 23 Agustus 1998, hlm. 14.

penumpasan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) di Aceh sejak beberapa tahun terakhir ini.¹³ Berikut pernyataan Wiranto:

“Saya selaku pimpinan ABRI, atas nama seluruh prajurit yang pernah bertugas maupun yang sedang bertugas di daerah ini, dengan penuh ketulusan minta maaf kepada seluruh rakyat Aceh, atas tingkah laku beberapa gelintir prajurit ABRI yang telah menyebabkan munculnya berbagai ekses yang merugikan rakyat. Saya menyadari bahwa selama ABRI berada di tengah masyarakat untuk melaksanakan tugas, ada oknum yang melakukan tindakan diluar batas kepatutan, yang dapat melukai hati rakyat. Saya pribadi beserta seluruh anggota ABRI sangat menyayangkan tingkah laku yang jauh dari ajaran agama itu.”¹⁴

Seluruh prajurit yang pernah bertugas atau yang sedang bertugas pada saat itu dengan penuh ketulusan harus memohon maaf kepada seluruh rakyat Aceh, atas tingkah laku beberapa gelintir prajurit ABRI yang telah menyebabkan munculnya berbagai tindakan yang merugikan rakyat. Pangab sengaja datang ke Aceh untuk mendengar, melihat, dan merasakan langsung apa yang dialami rakyat Aceh selama ini.

Setelah menceritakan bagaimana latar belakang pengiriman pasukan ABRI dari luar ke Aceh sejak munculnya gangguan keamanan sejak tahun 1989, Jenderal Wiranto menilai kondisi di Aceh, sekarang dapat dikatakan sudah relatif aman. Meskipun pada saat itu secara jujur dan realistis diakui bahwa masih terdapat sejumlah kecil GPK bersenjata,

¹³ Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm. 74.

¹⁴ Mba, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 11.

namun ABRI diminta harus segera lebih mengecilkan jumlah satuannya yang ada di Aceh.¹⁵

Wiranto menyatakan sangat optimis dibawah kepemimpinan para ulama, guru, pejabat, serta tokoh masyarakat, situasi di Aceh akan dapat dipulihkan seperti sediakala. Ulama dan tokoh masyarakat di Aceh perlu membantu pembinaan prajurit ABRI dan juga mengingatkan prajurit melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan. Bila prajurit mendekati kemungkaran, ulama harus menegur dan memperbaikinya, dan bila ada prajurit yang bertingkah laku tidak terpuji akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah dan ABRI harus membuka pintu bagi sisa-sisa Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Aceh yang sudah sadar dan ingin kembali ketengah-tengah keluarga dan masyarakat. ABRI dan ulama di Aceh masih terus memanggil mereka yang terlanjur menjadi GPK, agar kembali kepada keluarganya dan akan diterima baik oleh pemerintah. Bagaimanapun mereka yang terlanjur menjadi GPK adalah saudara sebangsa dan atas kesalahan mereka, pemerintah dapat memaafkan. Anggota GPK Aceh yang bersembunyi di luar negeri juga diminta agar menyerahkan diri. Keluarganya bersedia pula untuk membawa mereka pulang ke tanah air, karena baik ABRI maupun pemerintah tetap membuka pintu kepada anggota-anggota GPK yang mau kembali.¹⁶

¹⁵ Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm. 74.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

Hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum biasa, seperti yang diberlakukan di daerah lain di Indonesia. Seluruh prajurit harus menegakkan hukum itu dengan sungguh-sungguh. Hanya mereka yang terbukti GPK yang akan dihadapi oleh rakyat dan juga ABRI. Menyangkut dengan tahanan politik dan narapidana politik yang terkait dengan yang menamakan diri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada masa lalu, akan segera diajukan pertimbangan yang realistis kepada presiden agar dapat diberikan amnesti 17 Agustus 1998.¹⁷ Wiranto menjelaskan bahwa:

“Kalau ada tindak kriminal mereka akan ditindak dengan KUHP dan yang menangani adalah aparat kepolisian. Seluruh prajurit harus menegakkan hukum itu dengan sungguh-sungguh, hanya mereka yang nyata-nyata GPL yang akan dihadapi oleh rakyat bersama ABRI”¹⁸

Berdasarkan hal itu, peran ulama dibutuhkan untuk menghimbau anggota GPK yang belum kembali ke dalam masyarakat atau yang lari ke luar negeri, agar segera kembali ke tanah air dan menyerahkan senjata kepada ABRI bagi yang masih memilikinya. Mereka tidak akan ditahan dan ditangkap, kecuali bila mereka memang terbukti terlibat masalah pidana.

Keputusan mengakhiri era operasi militer di Aceh tidak hanya berdasarkan analisis situasi keamanan semata-mata tapi diputuskan berdasarkan hati nurani untuk menghentikan penderitaan rakyat dan kesulitan aktivitas sipil di daerah yang bermasalah. Bahkan Jenderal Wiranto telah melarang penggunaan kata GPK yang dikaitkan dengan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁸ Mba, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 11.

nama daerah Aceh tetapi cukup menyebut Gerakan Pengacau Liar (GPL) dengan nama kelompok pengacau keamanannya. Berkat bantuan dan kerja sama antara ABRI, ulama dan masyarakat dan situasi tersebut dapat terkendali dengan baik.¹⁹

B. Dampak DOM bagi Masyarakat Aceh

Operasi militer yang dilakukan dengan dalih untuk melumpuhkan gagasan Aceh Merdeka telah menyebabkan banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada rakyat sipil di Aceh. Kekerasan yang berlaku di barak-barak tentara sejak DOM diberlakukan terutama di wilayah pergolakan utama yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur meninggalkan penderitaan kepada rakyat Aceh.²⁰ Pada masa DOM tahun 1989-1998, warga sipil Aceh banyak mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi dalam bentuk-bentuk pembunuhan, penculikan, penyiksaan, dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta pelecehan seksual kepada perempuan berupa penelanjangan hingga dalam bentuk pemerkosaan.²¹

Banyaknya orang hilang dan juga tewas dalam operasi militer di Aceh juga diperkuat dengan adanya kampung-kampung janda di Aceh.

¹⁹ Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm. 77.

²⁰ Abdullah Sani Usman. *Krisis Legitimasi Politik dalam Sejarah Pemerintahan di Aceh*. Jakarta: Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2010, hlm. 212.

²¹ Kontras. *Aceh: Damai dalam Keadilan*. Jakarta: Kontras, 2006, hlm. 43.

Kampung Janda terbentuk karena banyaknya kaum lelaki yang diculik aparaturnya keamanan dan tidak kembali.²² Kondisi ini diperkuat dengan pernyataan warga desa yang mengubur mayat-mayat yang mereka dapatkan di sungai karena pembunuhan hampir berlangsung setiap hari dan tersebar di beberapa daerah. Beberapa diantaranya telah mati dalam eksekusi di depan umum, yang lain dibunuh secara rahasia, badan mereka sering kali membusuk dan terpotong, tergeletak ditempat-tempat umum sebagai peringatan atau teror bagi lainnya.²³

Pola kekerasan tentara Indonesia yang sangat tidak berperikemanusiaan. Perundang-undangan yang berlaku diabaikan sama sekali. Tuduhan-tuduhan subversif dan pemberontakan ditujukan kepada rakyat dengan membabi buta dan sesuka hati mereka. Aparat keamanan tidak mampu membedakan antara rakyat biasa dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang juga disebut dengan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Mangsa yang dianiaya dituduh membantu GAM ataupun mempunyai senjata gelap, tanpa ada bukti yang jelas terhadap tuduhan tersebut.²⁴

Mengenai berbagai pola dan bentuk penindasan dan pembunuhan rakyat tak berdosa seolah-olah tidak percaya kejamnya perlakuan ABRI

²² Foto salah satu Kampung Janda dapat dilihat pada Lampiran 16, hlm. 113

²³ Afadlal, (dkk). *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 264.

²⁴ Abdullah Sani Usman, *loc.cit.*

yang harus diterima rakyat Aceh. Pada periode tiga tahun pertama, yaitu antara tahun 1990 hingga 1993 merupakan rentang waktu terburuk operasi militer dijalankan. Ribuan rakyat sipil di Aceh dibunuh tanpa diketahui dimana kuburannya.²⁵ Diperkirakan pembantaian akibat diberlakukannya DOM lebih banyak lagi yang belum terungkap. Ini disebabkan Pemerintah Pusat tidak serius mengungkapkan berbagai pelanggaran, dan bahkan melakukan hambatan terhadap upaya investigasi dan sensus penduduk Aceh secara keseluruhan. Penduduk Aceh setelah DOM tidak lagi mencapai 4,2 juta sebagaimana dinyatakan saat itu.²⁶

Sesudah DOM dicabut, rakyat menuntut pengadilan atas sejumlah anggota ABRI yang terlibat dalam pembantaian semasa DOM, namun sampai sekarang tidak ada penyelesaian hukum terhadap pelaku-pelaku DOM. Tidak ada pengadilan bagi mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas pembantaian itu. Perhatian serius terhadap korban DOM, maupun anggota keluarga dari korban DOM yang mengalami trauma kekerasan kurang diberikan pemerintah. Fenomena ini mencerminkan mafia peradilan (*Judicial Violence*) dalam sistem hukum di Indonesia.²⁷ Melalui rekayasa hukum dan peradilan, ada pihak yang sengaja dilindungi sehingga menjadi kebal hukum, ada pula yang sengaja dikorbankan untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Kasus DOM membuktikan tidak

²⁵ Foto Kuburan massal DOM dapat dilihat pada Lampiran 17, hlm. 114.

²⁶ Abdullah Sani Usman, *op.cit.*, hlm. 213.

²⁷ Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm. 28.

adanya supremasi hukum, yang ada hanyalah supremasi kekuasaan. Elite penguasa mampu merekayasa hukum sehingga fungsi dan peranannya tunduk pada atau menjadi subordinat dari kekuasaan.

Pada dasarnya seluruh orang Aceh menghendaki agar para pelaku yang melakukan DOM agar diproses, lalu pemerintah mengambil prakarsa untuk mensejahterakan masyarakat. Tidak cukup hanya Presiden Habibie sebagai Panglima Tertinggi meminta maaf. Masyarakat Aceh menuntut Pemerintah agar segera mengambil tindakan penyelamatan dengan mengadili oknum ABRI yang melakukan kekerasan. Oleh sebab itu, Pimpinan Tertinggi ABRI semestinya menindak mereka yang bertanggung jawab atas pembuangan dan pembunuhan warga Aceh semasa DOM, sehingga tidak menimbulkan dendam dikalangan masyarakat Aceh, namun yang terjadi setelah kebijakan DOM dicabut, pelakunya tidak diproses secara hukum. Akibatnya masyarakat terlanjur menilai bahwa pemerintah pusat sangat lamban menangani kasus-kasus DOM.²⁸

Selain ABRI, Pemerintah Daerah (Pemda) punya kewajiban untuk mengembalikan situasi di Aceh seperti sedia kala dengan cara merehabilitasi kondisi masyarakat baik fisik maupun psikis. Termasuk dibeberapa daerah lain yang tidak hanya kehilangan anggota keluarga, namun juga diikuti kehilangan harta benda, penjarahan, bahkan pembakaran rumah. Rehabilitasi itu mencakup juga ganti rugi atas barang-barang yang dirampas aparat dari masyarakat, tanah, kendaraan, perhiasan,

²⁸ Syamsuddin Haris, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 62.

uang, dan sebagainya, serta menjadi bagian dari proses rehabilitasi yang bertahap dan harus dilakukan.²⁹

Harus ada upaya pemerintah untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap fisik korban secara langsung, misalnya ada yang cacat, terluka, dan sebagainya. Pemerintah harus mengumumkan secara terbuka siapa-siapa saja yang menjadi korban kekerasan ini untuk mendaftar di rumah sakit untuk diberikan pengobatan gratis, untuk menunjukkan itikad pemerintah mau memperbaiki kondisi atau merehabilitasinya. Hal demikian akan membawa dampak psikologis terhadap proses pemulihan di masyarakat.³⁰

Para korban DOM seharusnya lebih diperhatikan. Anggota ABRI harus ditarik mundur dari Aceh. Semua tuntutan ini secara jelas dikemukakan oleh Delegasi Masyarakat Aceh (DMA) yang pada tanggal 8 Januari 1999 mendatangi Presiden Habibie. Presiden Habibie menerima rombongan yang dipimpin oleh Gubernur Syamsuddin Mahmud. Dalam kesempatan tersebut DMA menyampaikan 5 butir tuntutan masyarakat Aceh yaitu yang pertama rakyat Aceh menuntut penegakan hukum atas pelanggaran HAM oleh aparat militer selama diberlakukannya Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), yang kedua rakyat Aceh meminta Presiden Habibie untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap tapol/napol kasus Aceh, yang ketiga rakyat Aceh meminta Presiden dan

²⁹ Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm. 95.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 95.

DPR merumuskan UU yang mendukung status Aceh sebagai Daerah Istimewa, yang keempat dalam kaitan dengan Otonom Daerah, rakyat Aceh menuntut agar Pemerintah Daerah Istimewa Aceh memperoleh keleluasaan dalam mengelola harta kekayaan daerah tanpa intervensi berlebihan dari pemerintah pusat, yang kelima dalam UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang baru, rakyat Aceh menuntut.³¹

Dalam kesempatan itu Presiden Habibie telah memerintahkan Dewan Penegak Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH) yang dipimpinnya sendiri untuk mengikutsertakan Gubernur Aceh, untuk segera bersidang dalam membahas kasus Aceh. Selain itu, Presiden Habibie juga telah mendengarkan secara langsung suara rakyat Aceh dalam kunjungan beliau ke Banda Aceh pada tanggal 26 Maret 1999. Pada kesempatan itu wakil masyarakat Aceh telah menyampaikan pendapat yang pada intinya dapat digolongkan dalam tiga kelompok pendapat tentang menyelesaikan masalah Aceh, yaitu kelompok pertama, menuntut diberikannya otonomi seluas-luasnya yang disertai perimbangan keuangan pusat dan daerah yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntutan yang disampaikan DMA di Jakarta kepada Presiden Habibie pada tanggal 8 Januari 1999. Pada umumnya mereka terdiri dari tokoh pemerintah dan pengusaha baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

³¹ Syamsuddin Haris, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 63.

Kelompok kedua, menuntut didirikannya Republik Indonesia Serikat (Negara Federal), dimana Aceh tetap sebagai salah satu negara bagiannya. Pada umumnya mereka terdiri para tokoh cendekiawan dan LSM. Kelompok ketiga, yang terdiri dari para mahasiswa dan pelajar menuntut diadakannya referendum bagi rakyat Aceh, apakah masih tetap akan bergabung dalam negara kesatuan RI ataukah akan merdeka. Pemerintah Habibie bukannya memenuhi tuntutan otonomi, tetapi justru mengulang aksi kekerasan militer semasa DOM. Tuntutan masyarakat Aceh tidak pernah dilakukan secara cepat dan tuntas, sehingga makin menambah kemarahan masyarakat terhadap semua anggota ABRI yang bertugas diwilayah itu. Tradisi kekerasan militer yang tetap terulang meskipun status DOM sudah dicabut mengakibatkan situasi di Aceh setelah reformasi lebih buruk dari pada masa DOM.³²

³² Oki. "Kondisi Aceh Lebih Buruk dari Semasa DOM", *Kompas*, 16 Juni 1999, hlm. 15. Lihat pada Lampiran 18, hlm. 115.